



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dapat disusun.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan visi "***Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera***". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan tiga misi yaitu menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu "***Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian***". Selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja ini di susun sebagai bahan yang dievaluasi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, Januari 2024



KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

DR. H. AREADY, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750302 200212 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini memberikan gambaran tentang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023. Laporan ini merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan kinerja memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu Laporan Kinerja juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai Perubahan APBD Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis mengelola anggaran sebesar Rp 772.100.171.968 yang terdiri dari Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp. 19.304.093.098,- Belanja Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebesar Rp 683.081.619.281, dan Belanja-Belanja lain yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kab. Bengkalis. Realisasi Keuangan sebesar 72.46% dengan penyerapan dana sebesar Rp 559.470.909.918. Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, BPKAD melaksanakan 3 (Tiga) program, 13 kegiatan dan 75 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember 2023 adalah realisasi fisik sebesar 98%.

Dalam pelaksanaan ketugasannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan perangkat regulasi yang belum lengkap dan sistem informasi keuangan yang belum terintegrasi.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	9
B. Analisis Kinerja	9
C. Realisasi Anggaran	18
D. Analisis Efisiensi	18
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

BAB I

BAB II

Tabel 2.1 Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun
2021-2026 7

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Bengkalis 8

BAB III

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 9

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 10

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 12

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 13

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 14

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 17

Tabel 3.7 Capaian Kinerja dan Anggaran 18

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapainya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.
2. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. **Kepala Badan;**
2. **Sekretariat;**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Kelompok JF
3. **Bidang Anggaran;**
 - a. Sub Bidang Anggaran I
 - b. Sub Bidang Anggaran II
 - c. Kelompok JF

4. Bidang Perbendaharaan;

- a. Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah
- b. Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah
- c. Kelompok JF

5. Bidang Akuntansi;

- a. Sub Bidang Akuntansi I
- b. Sub Bidang Akuntansi II
- c. Kelompok JF

6. Bidang Aset;

- a. Sub Bidang Analisa kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan
- b. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset
- c. Kelompok JF

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan penunjang pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan aset
- c. Pelaksana tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)
- d. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah
- e. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta kepegawaian dan umum, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana strategis, rencana kerja perangkat daerah,

rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan noram, standar, prosedur dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait Sekretariat, Sekretaris dibantu oleh kelompok JF.

3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas dan fungsi :

Bidang anggaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang anggaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran
- c. Pengendalian penyusunan anggaran dan;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan anggaran, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh kelompok JF.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang perbendaharaan.

Dalam menjalankan tugas & kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;

- b. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. Pengelolaan utang piutang daerah;
- e. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan dan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dan;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Perbendaharaan, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh kelompok JF.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait akuntansi dan konsolidasi, analisa data dan pelaporan, pembinaan akuntansi dan pelaporan konsolidasian kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur akuntansi dan konsolidasi, analisa data dan pelaporan, serta pembinaan akuntansi dan pelaporan untuk konsolidasian kabupaten;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dibantu oleh kelompok JF.

6. Bidang Aset

Bidang aset mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- b. Penyelenggaraan penatausahaan, dan penghapusan barang milik daerah;
- c. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindah tanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah
- d. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan, dan pemeliharaan barang milik Daerah
- e. Penyelenggaraan fungsi lain diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Aset, Kepala Bidang Aset dibantu oleh kelompok JF.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kelompok JF ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Pelaksanaan kegiatan kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Tabel 2.1
Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkulu
Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
			2022	2023	2024	2025	2026
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Optimalisasi Penataan Aset Daerah	Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur	45%	50%	55%	60%	65%	70%
	Persentase Pemanfaatan Kekayaan Aset Daerah yang Menunjang Peningkatan PAD	35%	40%	45%	50%	55%	75%
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu	Ketepatan waktu Penyusunan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
Terwujudnya Penyampaian Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Yang Tepat Waktu	Persentase bendahara pengeluaran yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggung jawaban	85%	86%	87%	88%	89%	90%
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Manajemen Akuntabel dan Berkinerja Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Optimalisasi Penataan aset daerah	Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur	55%
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
3	Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

**Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2023**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Optimalisasi Penataan Aset Daerah	Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur	55%	55%	100%
	Persentase Pemanfaatan Kekayaan Aset Daerah yang Menunjang Peningkatan PAD	45%	45%	100%
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Ketepatan waktu Penyusunan APBD	Tepat waktu	Tepat Waktu	100%
Terwujudnya Penyampaian Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Yang Tepat Waktu	Persentase bendahara pengeluaran yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggung jawaban	87%	87%	100%
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat waktu	Tepat Waktu	100%
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	100%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 5 (Empat) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 85\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

“Terwujudnya Optimalisasi Penataan Aset Daerah”

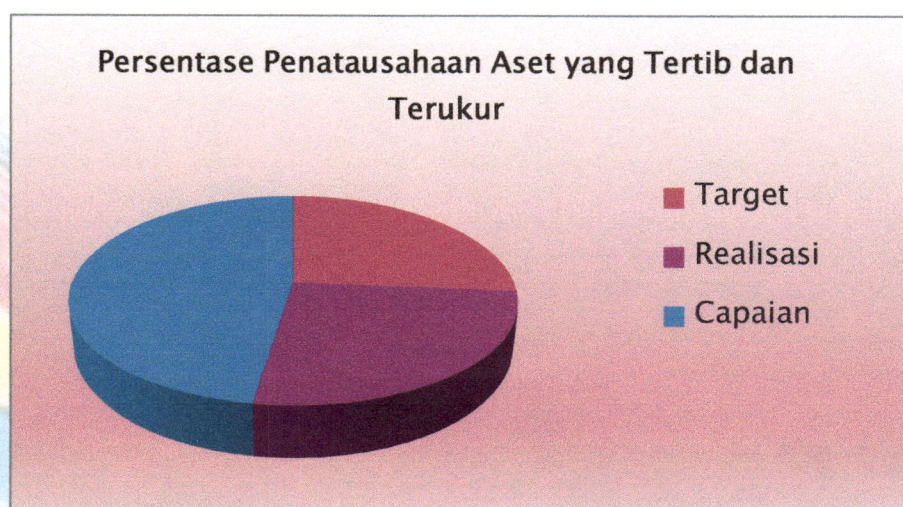
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Capaian Tahun 2021 terhadap Tahun 2023
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur	45%	50%	55%	55%	100%	100%
Persentase Pemanfaatan Kekayaan Aset Daerah yang Menunjang Peningkatan PAD	35%	40%	45%	45%	100%	100%
	Rata-rata capaian					

1. *Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur*

Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur pada tahun 2023 tercapai 100% dari target 55% dengan realisasi 55%. Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur ini melalui tata kelola menggunakan aplikasi SIMDA BMD terhadap pencatatan seluruh aset sesuai dengan penggolongan barang. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja penatausahaan aset yang tertib dan terukur dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Gambar 3.1
Skor Capaian Sasaran 1.1



Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. SDM yang memadai dalam pengelolaan BMD
- b. Adanya aplikasi SIMDA BMD

Potensi Hambatan

- a. Terlambatnya OPD menyampaikan informasi BMD
- b. Jaringan Aplikasi SIMDA masih Local Area Network (LAN)

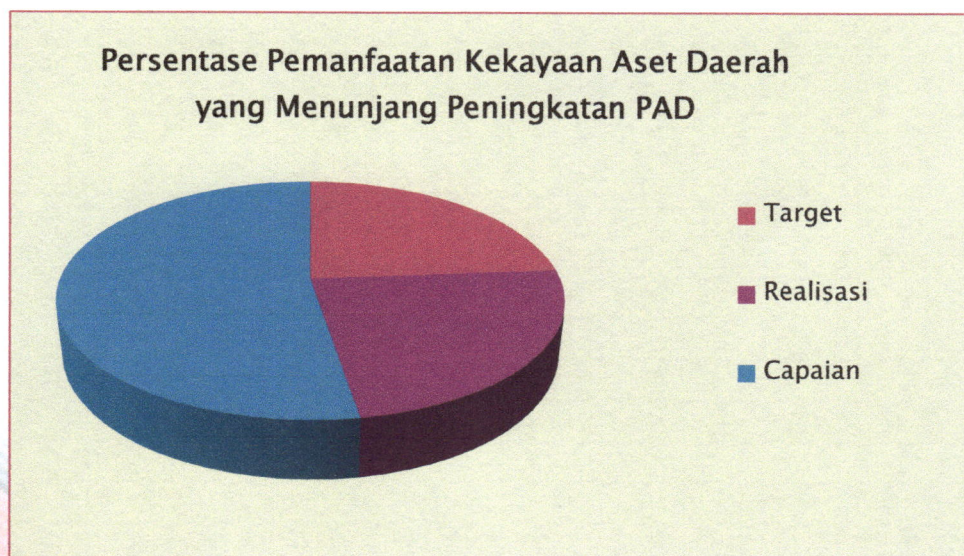
Strategi Pemecahan

- a. Melakukan pelatihan / bimbingan teknis dan sosialisasi terkait pengelolaan BMD
- b. Pindah ke aplikasi baru yaitu e-BMD

2. Persentase Pemanfaatan Kekayaan Aset Daerah yang Menunjang Peningkatan PAD

Berdasarkan evaluasi terhadap persentase pemanfaatan kekayaan asset daerah yang menunjang peningkatan PAD diketahui bahwa capaian awal tahun 2021 sebesar 35%, tahun 2022 40%. Pada tahun 2023 dari target 45% terealisasi 45% dengan capaian 100%. Dari pemanfaatan asset daerah berupa bangunan gedung, peralatan mesin dan jalan, jaringan dan irigasi.

Gambar 3.2
Skor Capaian Sasaran 1.2



Faktor Pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. BMD yang dimanfaatkan berfungsi dengan baik
- b. Adanya regulasi terhadap pengelolaan pemanfaatan kekayaan asset daerah

Potensi Hambatan

- a. Kurangnya SDM yang memahami pengelolaan asset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD.

Strategi Pemecahan

- a. Diperlukan pemeliharaan secara berkala terhadap asset yang dapat dimanfaatkan

Sasaran 2

"Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis"

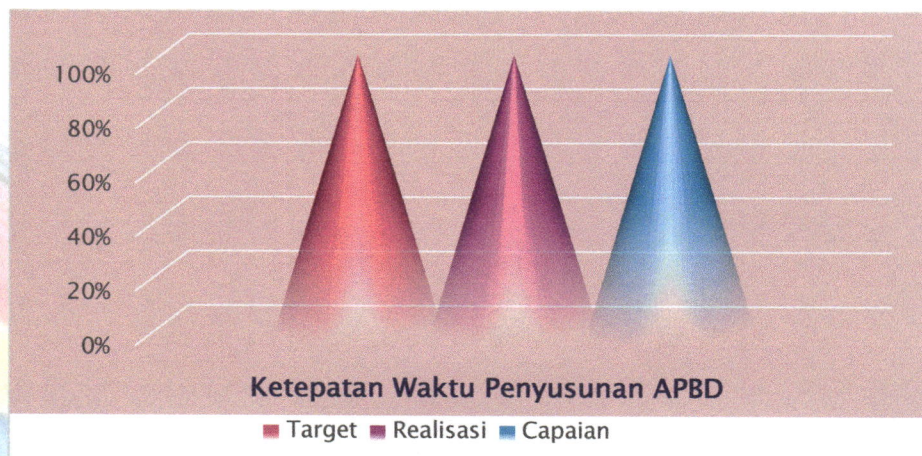
Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Capaian Tahun 2021 Terhadap Tahun 2023
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu
			Rata-rata Capaian		100%	100%

1. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD

Indikator Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dengan realisasi Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024.

Gambar 3.3
Skor Capaian Sasaran 2



Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Komitmen antara Kepala Daerah dan DPRD untuk menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- b. Kerjasama yang baik dari pengelola keuangan SKPD dalam pelaksanaan penyusunan APBD mulai dari tahap perencanaan sampai tahap penganggaran hingga tercapainya penyusunan APBD yang tepat waktu.

Potensi Hambatan

- a. Aplikasi yang terkadang error

Strategi Pemecahan

- a. Melakukan updating sistem dan jaringan untuk memperkuat sistem sehingga memperkecil terjadinya system error.
- b. Peningkatan server aplikasi

Sasaran 3:

"Terwujudnya Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang Tepat Waktu"

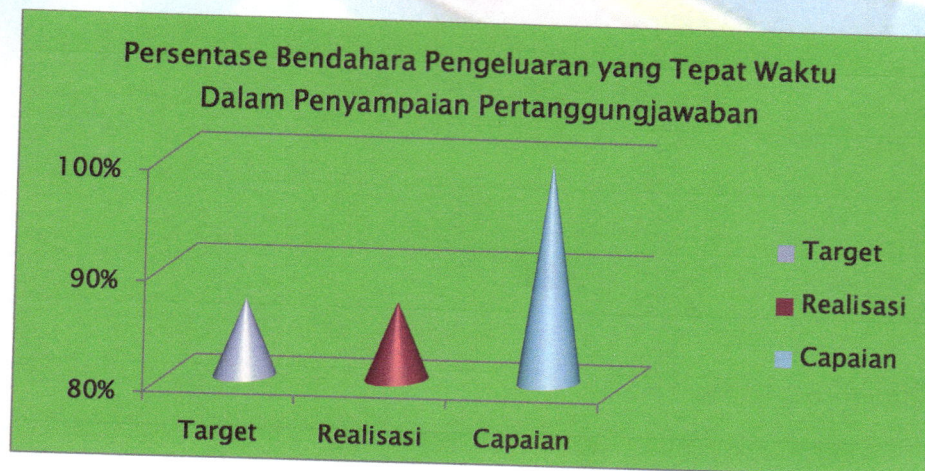
Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Capaian Tahun 2022 Terhadap Tahun 2023
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Bendahara Pengeluaran yang Tepat Waktu Dalam Penyampaian Pertanggungjawaban	-	86%	87%	87%	100%	100%
			Rata-rata Capaian			

1. Persentase Bendahara Pengeluaran yang Tepat Waktu Dalam Penyampaian Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil evaluasi bendahara dari 47 SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban dengan capaian 100% dari target 87% dengan realisasi 87%, Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil penyampaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Baik I SPJ Fungsional maupun Laporan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) / Daftar Transaksi Harian (DTH).

Gambar 3.4
Skor Capaian Sasaran 4



Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- Kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai.

Potensi Hambatan

- Masih lemahnya System Aplikasi SIPD Penatausahaan
- Dalam Penerapan SIPD Penatausahaan masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga perlunya penyesuaian dalam penerapan penatausahaan

Strategi Pemecahan

- Perlunya Koordinasi dengan Kementerian terkait akan penerapan SIPD
- Peningkatan Server Aplikasi

Sasaran 4 :

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Capaian 2022 Terhadap 2023
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%	100%

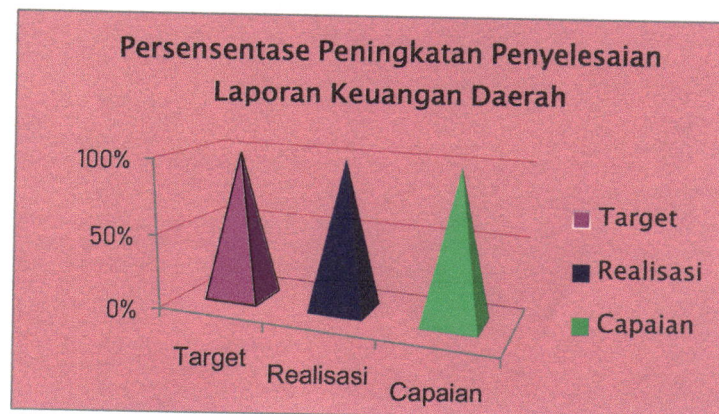
1. Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase peningkatan penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah, dengan capaian 100%. Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil Opini yang diberikan BPK-RI Perwakilan Riau atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

Untuk mendapatkan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada SAP berbasis akrual tahun 2022 antara lain:

1. Menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan
2. Evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi
3. Pengendalian interens terhadap kepatuhan Peraturan Perundang-undangan
4. Asistensi pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Gambar 3.5
Skor Capaian Sasaran 3



Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Adanya sinergitas dan kerjasama yang baik antar tiap Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Potensi Hambatan

- a. Belum mendapatkan nilai penyusutan aset
- b. Lemahnya system aplikasi SIPD Pelaporan Pertanggungjawaban
- c. Belum selesainya rekonsiliasi antara penatausahaan dari Bank sehingga terlambatnya angka belanja

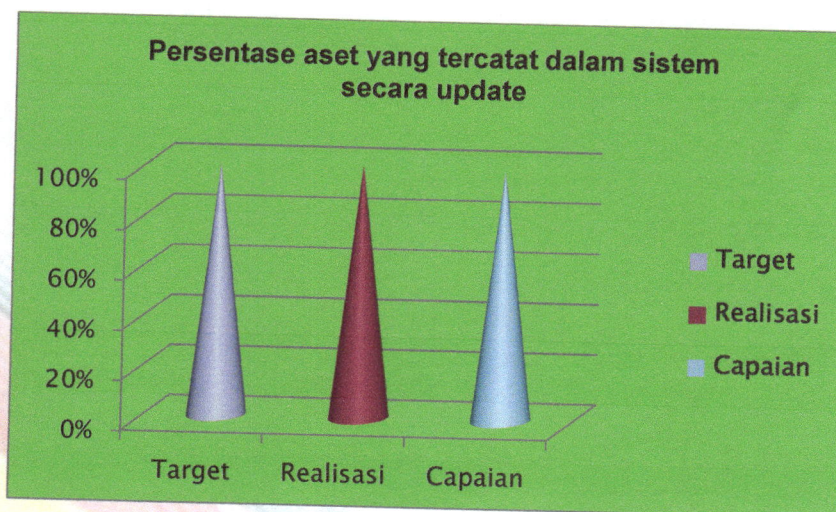
Strategi Pemecahan

- c. Nilai Penyusutan Aset diperoleh setelah semua SKPD selesai mengentri asset
- d. Akan dilakukan Penyesuaian Akun
- e. Peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.
- f. Menyempurnakan peraturan terkait kebijakan akuntansi dan mengembangkan aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi
- g. Peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi
- h. Dipercepatnya rekonsiliasi agar mendapat angka belanja.

2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkalis Per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Gambar 3.6
Skor Capaian Sasaran 4



Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai

Potensi Hambatan

- a. Terlambatnya petugas entry mengentri di system
- b. Lemahnya system Aplikasi SIPD Pelaporan

Strategi Pemecahan

- a. Mengingatkan para petugas untuk segera mengentri
- b. Melakukan koordinas dengan Kementerian terkait SIPD Pelaporan

Sasaran 5:

“Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik”

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja evaluasi internal dan capaian kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja 100% dari target Predikat BB telah terealisasi BB. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

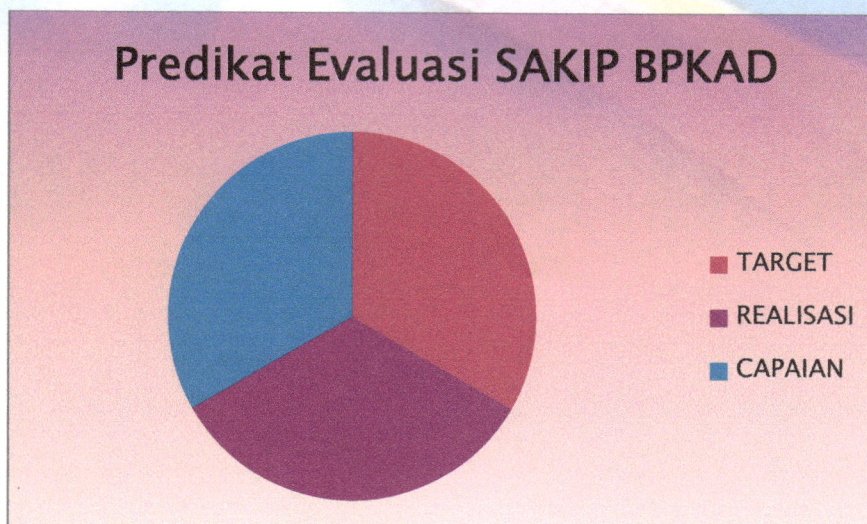
Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Capaian 2021 Terhadap 2023
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%	100%

1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor : 700.1.2.1/105/ITDA tanggal 5 Juli 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis mendapat nilai 74.35 dengan kategori **BB** interpersi **Sangat Baik** dengan rincian nilai perencanaan kinerja 24.60, Pengukuran Kinerja 20.70 Pelaporan Kinerja 11.55 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 17.50.

Gambar 3.8
Skor Capaian Sasaran 5



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Belanja Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp 559.470.909.918 atau 72.46% dari pagu Belanja sebesar Rp. 772.100.171.968. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp. 7.777.377.066. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan yaitu sebesar Rp. 5.184.065.971. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja dan Anggaran TA 2023

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya optimalisasi penataat aset daerah	100%	5.798.723.400	5.184.065.971	89.40%
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis	100%	12.826.966.000	11.738.115.522	91.51%
Terwujudnya Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang Tepat Waktu	100%	8.052.355.300	7.777.377.066	96.59%
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	8.593.215.000	8.099.112.014	94.25%
Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja dg Baik	100%	50.660.045.200	45.325.424.429	89.47%
Total		85.931.304.900	78.124.095.002	90.91%

D. Analisis Efisiensi

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TA. 2022

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya optimalisasi penataat aset daerah	100%	89.40%	10.6%
2	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis	100%	91.51%	8.49%
3	Terwujudnya Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang Tepat Waktu	100%	96.59%	3.41%
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	94.25%	5.75%
5	Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja dg Baik	100%	89.47%	10.53%

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis telah dicapai. Yaitu dari 7 indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan di usulkan pada tahun yang akan datang.
2. Penetapan program dan kegiatan dengan penganggaran berbasis kinerja yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan.
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2024


KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

Dr. H. AREADY, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750302 200212 1 004